



## DETERMINAN TERJADINYA KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*) PADA DINAS PEMERINTAH SE KABUPATEN GROBOGAN

Devia Prapnalina Chandra<sup>✉</sup>, Sukardi Ikhsan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juni 2015  
Disetujui Juli 2015  
Dipublikasikan Agustus 2015

*Keywords:*  
*Fraud; Perception;*  
*Government Sector.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) seperti keefektifan pengendalian internal, budaya etis, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 182 pegawai instansi dinas pemerintahan di Kabupaten Grobogan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat analisis *smartPLS 2.0*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh negatif budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Saran pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan observasi atas objek penelitian untuk mengetahui kesediaan objek penelitian, dan menambah faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

### Abstract

*This research aims to explore the perceptions of employees in government agencies about the factors that affect to the of accounting fraud as internal control effectiveness, ethical culture, compensation, compliance enforcement of regulations, information asymmetry, and organizational commitment. This research using 182 employees as the samples by the respondent government agencies working in financial at the Department of Grobogan Regency. This research using convenience sampling. Data analysis in this research using a model full analysis structural equation modelling (SEM) with a smartPLS2.0. The results of the research showed that there are negative influences between the effectiveness of the control, the suitability of compensation, and the enforcement of the regulations by the tendency of accounting fraud in the government sector. there is a negative influence of with the tendency of accounting fraud in the government sector, there is a positive influence of asymmetry of information with accounting fraud trends in the government sector, there is no negative influence of ethical culture and organizational commitment with a tendency of accounting fraud in the sector of government. The advice in this research to conduct observation over the object of research to determine the willingness of the research object, and add to other factors that affect the tendency of accounting fraud.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: deviaprapchan@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*fraud*) telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa *fraud* dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Soepardi,2010). Tindak korupsi yang sering kali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Kasus *fraud* yang juga banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang lebih mengarah pada tindak korupsi. Negara Indonesia dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan masih merupakan negara berkembang juga terkena kasus skandal korupsi, tercatat pada tahun 2011 skor Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) adalah 3.0 dengan menempati peringkat 100 dari 183 negara yang diukur tingkat index korupsi. Fenomena tindak korupsi sudah banyak dilakukan pejabat atau pegawai di pemerintahan dalam beberapa tahun ini baik pelakunya dari kepala daerah, pejabat birokrasi, pegawai swasta, serta pegawai negeri sipil.

Menurut data yang diambil dari Sinar Harapan, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat selama tahun 2012 ada 215 kasus dugaan korupsi yang tersebar 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Jumlah kasus korupsi yang terungkap itu,naik lebih dari 100 persen dibanding kasus yang terungkap di 2011, yakni sebanyak 102 kasus

korupsi. KP2KKN hanya berhasil menghitung kerugian keuangan negara 71 persen dari 215 kasus itu, dari 71 persen itu terdapat kerugian negara sebesar Rp 381 miliar. Kasus korupsi yang mencuat ke publik khusus di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Semarang, Karanganyar, Klaten, Surakarta, Kabupaten Grobogan, Purworejo dan Kudus. Sedangkan pada tahun 2013 kasus korupsi melonjak menjadi 222 kasus dengan kerugian sebesar Rp 111 miliar yang tersebar di 35 kota/ kabupaten di Jawa Tengah.

Kabupaten Grobogan menjadi salah satu kabupaten yang terkena kasus korupsi di Jawa Tengah. Dalam 10 tahun terakhir terdapat beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian publik hingga ke pengadilan. Kasus korupsi E-KTP Rp 1,7, kasus korupsi pembangunan gedung BKK Rp 264 juta, kasus korupsi pembangunan jalan gajahmada paket 12 M, kasus korupsi pembangunan jalan danyang pulukulon 9 M dan truk jeketro 11 M, kasus korupsi perawatan mobil dinas DPRD 1,8 M yang saat ini masih proses persidangan.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, sementara kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pristiyanti (2012) melakukan penelitian pada pemerintah kota dan Kabupaten Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Rendy (2010) yang menyediakan bukti empiris secara periodik pentingnya kualitas prosedur pengendalian intern dan keadilan dari kebijakan organisasi sebagai prosedural dan distributif keadilan di tempat kerja untuk pencegahan kecurangan oleh karyawan.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah teori atribusi. Menurut Ivancevich *et al.*, (2006) dalam Najahningrum (2013), berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwa adalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang memengaruhi perilaku seseorang. Hubungan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Teori lainnya yaitu *fraud triangle theory* yang digunakan untuk penentuan variabel pada penelitian ini, yang terdiri dari tekanan (*Pressure*), peluang (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*).

Kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Adanya peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik atau efektif. Pengendalian internal yang baik atau efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

**H1: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan**

Kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dimotivasi oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan

individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*).

**H2: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan**

Etika manajemen akan menjadi tolok ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena seorang individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada didalam suatu organisasi, maka individu merasa apa yang dilakukannya sudah benar karena sebagian besar rekannya juga melakukan hal yang sama walaupun yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk tindakan kecurangan. Sulistyowati (2007) dalam penelitiannya menyatakan adanya pengaruh kultur organisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Penerapan budaya atau kebiasaan manajemen yang sesuai dengan etika yang ditetapkan akan menurunkan tingkat tindakan kecurangan (*fraud*).

**H3: Budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan**

Menurut Kang (2002) dalam Wilopo (2006) bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Bawahan memiliki informasi yang lebih banyak tentang kapabilitas produksi mereka dibandingkan atasan. Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi ini memotivasi bawahan untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang kapabilitas produksi mereka.

**H4: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan**

Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan peraturan maka semakin kecil pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan

tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Cieslewicz (2012) mengemukakan bahwa untuk memahami *fraud* yang terjadi di masyarakat Cina harus mempertimbangkan keadilan sosial seperti penegakan peraturan.

**H5: Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan**

Komitmen organisasi merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi tempat bekerja. Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau instansinya, maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

**H6: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.**

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas se-Kabupaten Grobogan. Penelitian yang dilakukan bukanlah penelitian populasi tetapi penelitian sampel, yaitu meneliti beberapa populasi yang mewakili. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Dari 15 dinas yang ada di Kabupaten Grobogan, jumlah sampelnya adalah 210 pegawai. Kuisisioner yang akan diolah adalah kuisisioner yang kembali dalam keadaan tidak rusak. Data diperoleh dengan cara penyebaran kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing responden. Dimana penilianannya dengan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju (sts), 2 = tidak setuju (ts), 3 = netral (n), 4 = tidak setuju (ts), 5 = sangat setuju (ss).

## VARIABEL PENELITIAN

### Variabel Dependen (Endogen)

*Fraud* di sektor pemerintahan merupakan persepsi pegawai dalam instansi pemerintah mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi di dalam sektor pemerintahan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi frekuensi kecurangan yang terjadi. Pengukuran variabel dependen ini menggunakan 9 item pertanyaan yang dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan akuntansi menurut *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE), yang terdiri dari : kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan, korupsi.

### Variabel Independen (Eksogen)

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam Fauwzi, 2011). Pengukuran variabel ini menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari unsur pengendalian menurut COSO dalam Wilopo (2006) mengandung 5 unsur pengendalian, yang terdiri dari : Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, prosedur pengendalian, pemantauan , informasi dan komunikasi.

Menurut Fauwzi (2011), sistem kompensasi adalah sistem penghargaan *financial* (upah pembayaran) dirancang agar mampu menarik perhatian, mempertahankan, dan mendorong karyawan agar bekerja dengan produktif. Pengukuran menggunakan skala *likert* 1-5 semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin sesuai kompensasi yang didapat. Variabel kesesuaian kompensasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan peneliti dari Gibson, (1997) dalam Wilopo (2006) perihal *reward* serta terdiri dari enam item pertanyaan dengan indikator yang dikembangkan oleh Wilopo (2006), yang terdiri dari : kompensasi

keuangan, pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, promosi, penyelesaian tugas, pencapaian sasaran, dan pengembangan pribadi.

Budaya etis adalah persepsi pegawai tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi seluruh pegawai yang berada di dalam instansi. Pengukuran menggunakan lima item pertanyaan yang dikembangkan dari teori Robins (2008) dalam Najahningrum (2013) dengan skala *likert* 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Indikator pengukuran variabel budaya etis manajemen meliputi : model peran yang *visibel*, komunikasi harapan- harapan etis, pelatihan etis, hukuman bagi tindakan etis dan mekanisme perlindungan etika.

Teori keagenan ( Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari lima pertanyaan dari instrumen yang dikembangkan dari Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Skala *Likert* 1 – 5 digunakan untuk mengukur respons dari responden, (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin menunjukkan tidak terjadinya asimetri informasi. Indikatornya antara lain : Situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan, situasi dimana manajemen lebih mengenal hubungan input-output dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya pihak luar perusahaan, situasi dimana manajemen lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawab dibanding pihak luar perusahaan, situasi dimana manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan, situasi dimana manajemen lebih mengetahui pengaruh eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.

Penegakan peraturan adalah proses pemungian norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan terdiri dari empat item pertanyaan yang dikembangkan dari Zulkarnain (2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju, dengan indikator sebagai berikut : ketaatan terhadap hukum, proses penegakan hukum, disiplin kerja dan tanggung jawab.

Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa kepercayaan, keterlibatan, dan loyalitasnya terhadap organisasi yang bersangkutan. Pengukuran menggunakan indikator lima item pertanyaan yang dikembangkan oleh Luthans (2006) dalam Pristiyanti (2012) dengan skala *likert* 1-5 dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Indikator pengukuran variabel komitmen organisasi adalah antara lain : bekerja melalui target, gembira memilih bekerja pada organisasi, menerima semua tugas, kesamaan nilai, bangga menjadi bagian organisasi, membanggakan organisasi pada orang lain, organisasi merupakan inspirasi, dan peduli pada nasib organisasi.

## **METODE ANALISIS DATA**

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi *smartPLS 2.0*. Metode analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, dan statistik inferensial (uji outer model, uji inner model)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Outer Model**

#### **Uji Convergent Validity**

Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis , kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, komitmen organisasi di

sektor pemerintahan. Pegujian validitas penelitian menggunakan alat bantu hitung yaitu *smartPLS 2.0*. Berdasarkan output pls dapat disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan yang diajukan hasilnya valid.

**Uji Discrimant Validity**

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji *discriminant validity* atau uji korelasi antar variabel menunjukkan nilai akar kuadrat ave setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model pada *correlation of latent variables*, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Tabel 1. AVE & Correlation of Latent Variables

	AVE		Akar AVE	
AI	0.691789		0.83173854	
BE	0.538079		0.733538683	
KK	0.480116		0.692904033	
KKA	0.683641		0.827007255	
KO	0.457882		0.676669786	
KPI				
PP	0.608557		0.780100634	

  

	AI	BE	KK	KKA	KO	KPI	PP
AI	1						
BE	0.049	1					
KK	0.060	0.381	1				
KKA	0.083	-0.100	-0.245	1			
KO	0.042	0.401	0.339	-0.105	1		
KPI	0.013	0.104	0.056	-0.295	0.123	1	
PP	0.370	0.086	0.031	-0.156	0.179	0.208	1

Sumber : Output PLS,2015

**Uji Inner Model**

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa nilai *R-Square* kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan fraud (k) 0.175952. Nilai *r-square* sebesar 0.175952 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk keefektifan pengendalian internal (KPI), budaya etis (BE), kesesuaian kompensasi (KK), penegakan peraturan (PP), asimetri informasi (AI), dan komitmen organisasi (KO) sebesar 17,59 % sedangkan

82,41% dijelaskan oleh konstruk lain di luar penelitian.

Tabel 2. R Square

	R Square
AI	
BE	
KK	
KKA	0.175952
KO	
KPI	
PP	

Sumber : Output PLS, 2015

**Pengujian Hipotesis**

Tabel 3. Uji Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
AI -> KKA	0.168064	0.145519	0.093185	0.093185	1.803558
BE -> KKA	0.021598	0.005615	0.052268	0.052268	0.413221

KK -> KKA	-0.266509	-0.255314	0.042672	0.042672	6.245527
KO -> KKA	0.033757	0.007643	0.071361	0.071361	0.473049
KPI -> KKA	-0.250844	-0.254734	0.040422	0.040422	6.205718
PP -> KKA	-0.182472	-0.173701	0.052231	0.052231	3.493517

Sumber : Output PLS, 2015

Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.250844 dan nilai *t-statistic* sebesar 6.205718 signifikan pada ( $p < 0.05$ ). Ini menunjukkan keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, dengan demikian **H1 dapat diterima**. Jadi, jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Thoyyibatun (2009) yang menyatakan bahwa bahwa *Internal Control Compliance* berpengaruh negatif terhadap *Accounting Fraud Tendency*. yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*). Jika terdapat peluang, seorang pegawai yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan fraud akan cenderung melakukan fraud. Peluang muncul melalui kelemahan dalam pengawasan sistem pengendalian internal suatu instansi.

Variabel Kesesuaian Kompensasi (KK) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.266509 dan nilai *t-statistic* sebesar 6.245527 signifikan pada ( $p < 0.05$ ). Ini menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian **H2 dapat diterima**. Jadi, jika semakin tinggi kesesuaian kompensasi dalam instansi, maka dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hal ini mengacu pada hasil riset yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi kesesuaian kompensasi pegawai instansi di pemerintahan maka dapat menekan tingkat

terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Variabel Budaya Etis (BE) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.021598 dan nilai *t-statistic* sebesar 0.413221 berada dibawah nilai kritis 1,659. Ini menunjukkan budaya etis tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian **H3 tidak dapat diterima**. Jadi, jika semakin etis budaya organisasi dalam instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2013) yang menemukan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Menurut Faisal (2013) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Variabel Asimetri Informasi (AI) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.168064 dan nilai *t-statistic* sebesar 1.803558 signifikan pada ( $p < 0.05$ ). Ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian **H4 dapat diterima**. Jadi, jika semakin tinggi asimetri informasi dalam instansi, maka dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2006) yang memperoleh hasil bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan (*fraud*). Jika dalam suatu organisasi diberlakukan transparansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan, maka akan menekan tindakan kecurangan (*fraud*).

Variabel Penegakan Peraturan (PP) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar -0.182472 dan nilai *t-statistic* sebesar 3.493517 signifikan pada ( $p < 0.05$ ). Ini menunjukkan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian **H5 dapat diterima**. Jadi, penegakan peraturan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian Najahningrum (2013) dan Faisal (2013) yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, akan membuka peluang bagi pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

Variabel Komitmen Organisasi (KO) berdasarkan tabel uji *path coefficient* menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.033757 dan nilai *t-statistic* sebesar 0.473049 berada dibawah nilai kritis 1,659. Ini menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), dengan demikian **H6 tidak dapat diterima**. Jadi, semakin tinggi komitmen organisasi pegawai instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Pengaruh terbesar dalam diri seorang individu berasal dari dalam diri individu tersebut (internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, seperti keserakahan, keinginan bergaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja.

## SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan selanjutnya diharapkan melakukan observasi atas objek penelitian untuk mengetahui kesediaan objek penelitian, dan menambah faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners. 2004. *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Black's Law Dictionary. 1990. 6th Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Fauwzi, Mohammad Glifandi Hari. 2011. *Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Melalui [www.google.com](http://www.google.com)
- Ghozali, Iman. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, Arfan & Muhammad Ishak .2005. "*Akuntansi Keperilakuan*". Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998. Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2001. Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening*. Melalui [www.google.com](http://www.google.com)
- Lou et al. 2009. "Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting". *Journal of Bussines & Economic Research* volume 7 number 2.
- Luthans. Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Yogyakarta :Penerbit Andi
- m.tempo.com ( diakses pada tanggal 13 November 2014)



- Mangkunegara Prabu Anwar.2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.Bandung:Remaja Rosdakarya
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY". Skripsi. S1 FE UNNES.
- Norbarani, Listiana. 2012. "Pendeteksian Kecurangan laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle* yang Diadopsi dalam SAS No.99". *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Pristiyanti, Ika Ruly.2012."Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan."Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Rae and Subramaniam.2008. "Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud." *Managerial Auditing Journal* Vol. 23 No. 2, 2008 pp. 104-124.
- Thoyibatun. 2009. *Analysing The Influence Of Internal Control Compliance And Compensation System Against Unethical Behavior And Accounting Fraud Tendency(Studies at State University in East Java. Palembang : Simposium Nasional Akuntansi XII.*
- Valentine et al. 2002. *Ethical context, organizational commitment, and person-organization fit*. *Journal of Business Ethics*. Vol. 41 No. 4, pp. 349-61.
- [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com) ( diakses pada tanggal 13 November 2014)
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan BUMD di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Melalui [www.google.com](http://www.google.com)
- Zulkarnain, Rifqi Mirza.2013. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)*.Skripsi.S1 FE UNNES.